

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasukan Rusia melakukan serangan secara masif ke penjuru Ukraina pada 24 Februari 2022, diawali dengan serangan misil ke target-target kunci, disusul dengan mobilisasi pasukan invasi dari sepanjang perbatasan Ukraina dengan Rusia dan Belarus. Otoritas Rusia menyebutkan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari “*Special Military Operation*”. Serangkaian kejadian tersebut merupakan babak baru dari konflik Rusia-Ukraina yang bermula sejak Februari 2014, di mana Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina, dilanjutkan dengan terlibatnya pasukan Rusia dalam aktifitas kelompok separatis Donetsk dan Lugansk di Ukraina Timur sejak April 2014 (Ray, 2023). Presiden Rusia, Vladimir Putin menyebutkan bahwa operasi militer khusus tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat Donbass terhadap represi rezim Kiev. Putin juga menuduh Ukraina melakukan genosida terhadap masyarakat Donbass (Hinton, 2022), tanpa adanya bukti kuat yang mendukung pernyataan tersebut. Selain itu, Putin juga menyebutkan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina (Waxman, 2022).

Pada tahap awal invasi, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami serangkaian kekalahan dengan jatuhnya beberapa daerah seperti Mariupol, Kherson, serta blokade militer di area ibukota Kiev. Akan tetapi, saat penelitian ini dibuat, front pertempuran bergeser ke wilayah Ukraina Timur (Region Luhansk dan

Donetsk) dan Ukraina Selatan (Region Kherson dan Zaporizhia) (Liveuamap Company, 2023). Selain terdapat blunder internal dari Angkatan Bersenjata Rusia, kesuksesan pertahanan dan perebutan wilayah oleh Angkatan Bersenjata Ukraina salah satunya didukung oleh faktor pengiriman bantuan militer dari negara-negara Barat.

Pemerintah Jerman adalah salah satu pihak yang mengirimkan berbagai jenis alutsista dan peralatan militer untuk membantu Angkatan Bersenjata Ukraina bertahan melawan Angkatan Bersenjata Rusia, meskipun Ukraina tidak terdaftar sebagai anggota Uni Eropa ataupun NATO. Sejak Februari 2014 hingga Januari 2022, Pemerintah Jerman hanya mengirim sejumlah perlengkapan medis. Hal tersebut berkaitan dengan partisipasi Pemerintah Jerman dalam Normandy Format, beranggapan jika mengirimkan bantuan militer ke Ukraina dapat merugikan keterlibatan mereka dalam dialog damai tersebut. Pemerintah Jerman menegaskan kembali posisinya dengan menolak pembelian peralatan militer mematikan (*lethal military equipment*) melalui NATO Support and Procurement Agency. (Lanoszka & Becker, 2023).

Setelah Februari 2022 hingga Desember 2022, Pemerintah Jerman memberikan bantuan militer ke Ukraina sejumlah 1,6 miliar Euro. Pada tahun berikutnya, Pemerintah Jerman menambah pengiriman bantuan militer sejumlah 5 miliar Euro, dengan tambahan pengiriman lainnya sejumlah 2,9 miliar Euro telah dianggarkan sejak dua tahun pertama perang yang akan tiba pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Sejak awal serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 hingga awal tahun 2025, Pemerintah Jerman telah mengirimkan bantuan militer

sejumlah 5,2 miliar Euro dari persediaan Angkatan Bersenjata Federal Jerman. Adapun bantuan militer yang diberikan oleh Pemerintah Jerman ke Ukraina meliputi *Armored Fighting Vehicle*, *Air Defence Systems*, *Artillery Systems*, serta *Drones and Anti-drone Systems*. Selain itu, Pemerintah Jerman juga memfasilitasi 10.000 pasukan Ukraina dalam pelatihan militer di Jerman senilai 282 miliar Euro (Bundesregierung, 2025). Namun, sebelum mengirimkan bantuan militernya ke Ukraina, Jerman melakukan serangkaian proses perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa pilihan alternatif yang sejalan dengan kepentingannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana proses perumusan kebijakan pengiriman bantuan militer Jerman ke Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina 2022-2024 melalui pendekatan analisis kebijakan luar negeri. Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah menganalisis topik seputar pengiriman bantuan luar negeri ke Ukraina sejak Invasi Rusia pada Februari 2022. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, artikel yang berjudul “*Aid in War or Aid to War? Foreign Aid in the 2022 War in Ukraine*” yang disusun oleh Igor Pellicciari (2022). Artikel tersebut membahas mengenai komparasi penerapan konsep *International Aid Public Policy* (IAPP) sebagai bentuk bantuan luar negeri (*Foreign Aid*) antara kasus Perang Bosnia 1992 dengan Perang Ukraina 2022. Indikator pembeda dalam penelitian tersebut antara lain: (1) skenario intervensi; (2) aktor yang terlibat —pengirim dan penerima bantuan; dan (3) bantuan yang diberikan. Pellicciari menyimpulkan dalam artikel tersebut bahwa bantuan luar negeri suatu negara dilandasi oleh kepentingan

politik luar negerinya. Selain itu, bantuan luar negeri digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi aktif dengan adanya pasokan bantuan finansial, bantuan militer, dan bantuan politik (Pellicciari, 2022).

Kedua, *research briefing* berjudul “*Military Assistance to Ukraine since the Russian Invasion*” yang disusun oleh Claire Mills (2022). *Research briefing* tersebut membahas mengenai serangkaian kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara Barat, NATO, serta Uni Eropa terhadap isu Ukraina yang dimulai sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Ketiga, artikel yang berjudul “*the Art of Partial Commitment: the Politics of Military Assistance to Ukraine*” yang disusun oleh Alexander Lanoszka dan Jordan Becker (2023). Artikel tersebut membahas mengenai besaran bantuan militer yang dikirim oleh negara-negara NATO ke Ukraina sejak 2014 hingga Januari 2022. Selain itu, artikel tersebut juga memetakan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan setiap negara.

Perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu antara lain: Pada artikel pertama hanya membahas perbandingan pengiriman bantuan luar negeri Barat terhadap dua kasus yang berbeda, yakni Perang Bosnia 1992 dan Perang Ukraina 2022 baik dari implementasinya serta motivasi yang melandasinya. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sudut pandang kepentingan luar negeri serta proses perumusan kebijakan di Jerman sebagai salah satu negara Barat pengirim kebijakan militer ke Ukraina; Pada artikel kedua memaparkan data-data mengenai bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara Barat, NATO, dan Uni Eropa ke Ukraina secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus

pada proses perumusan kebijakan bantuan militer Jerman ke Ukraina; Perbedaan dengan artikel ketiga, penelitian ini berfokus dari sudut pandang proses perumusan kebijakan pengiriman bantuan militer Jerman di tingkat domestik dengan menggunakan konsep Foreign Policy Decision Making.

1.2 Rumusan Masalah

Proposal penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses perumusan kebijakan pengiriman *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina sepanjang Perang Rusia-Ukraina 2022-2024. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diusulkan pada proposal penelitian ini adalah:

Mengapa Pemerintah Jerman meningkatkan pengiriman *Lethal Military Aid* ke Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alasan peningkatan pengiriman *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina selama Perang Rusia-Ukraina 2022-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis menggunakan Teori Foreign Policy Decision Making yang dikemukakan oleh William D. Coplin dalam

karyanya yang berjudul “*Foreign Policy Decision-making*”. Teori ini digunakan karena dapat menjelaskan bagaimana dinamika perumusan kebijakan suatu negara yang nantinya akan menghasilkan tindakan negara dalam konteks global. Coplin menjelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, setidaknya terdapat tiga faktor dasar yang menjadi pertimbangan para perumus kebijakan. Faktor pertama adalah *Domestic Politics*, yang dapat dimaknai sebagai kondisi politik dalam negeri yang menjadi faktor utama dalam proses perumusan kebijakan. Dalam *domestic politics* juga terdapat *policy influencers*, yaitu aktor-aktor politik dalam negeri yang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Faktor kedua adalah *Economic and Military Capability*, di mana faktor ini dapat dimaknai sebagai kapabilitas negara, baik secara ekonomi ataupun secara militer, untuk melaksanakan dan mempertahankan suatu kebijakan luar negerinya. Faktor ketiga adalah *International Context*, yang dapat dimaknai sebagai kedudukan sebuah negara dalam suatu sistem global, meliputi sistem geopolitik, geoekonomi, serta hubungan dengan negara-negara terkait dalam satu sistem tersebut (Coplin, 1974).

1.4.1 Politik Domestik

Secara tidak langsung, politik dalam negeri dapat memengaruhi politik luar negeri suatu negara. Dalam analisisnya, Coplin mencoba untuk memetakan hubungan yang terjalin antara para pengambil keputusan (*policy maker*) dalam sebuah kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri. Coplin kemudian menyebut aktor politik domestik tersebut sebagai *policy influencer*. Selanjutnya, Coplin mengklasifikasikan *policy influencer* ke dalam empat kategori, yaitu (1)

bureaucratic influencer, (2) *partisan influencer*, (3) *interest influencer*, serta (4) *mass influencer* (Coplin, 1974).

Bureaucratic influencer adalah beberapa individu serta organisasi-organisasi yang tergabung di dalam lembaga eksekutif pemerintah. Mereka biasanya membantu aktor *policy maker* untuk menyusun ataupun mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh yang besar, karena mereka berperan untuk menyalurkan informasi kepada aktor *policy maker*. Selain itu, mereka juga berperan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh aktor *policy maker* setelahnya. Dalam beberapa kasus, aktor *bureaucratic influencer* juga tergabung dalam jajaran aktor *policy maker*, yang kemudian menyulitkan penggambaran garis pemisah yang jelas untuk membedakan *bureaucratic influencer* sebagai *policy influencer* dengan aktor *policy maker*.

Partisan influencer adalah berbagai partai politik yang berperan untuk menyuarakan tuntutan masyarakat dalam bentuk tuntutan politik. Tuntutan tersebut biasanya disuarakan kepada aktor *policy maker* terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, *partisan influencer* biasanya berperan untuk memengaruhi kebijakan melalui tindakannya menekan pemerintah dengan menyediakan aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Interest influencer adalah individu-individu yang tergabung dalam sebuah kepentingan yang sama. Biasanya, keberadaan mereka masih belum cukup besar dan luas untuk menjadi bagian dari partai politik, tetapi mereka dapat

mengumpulkan berbagai sumber daya untuk mendapatkan dukungan dari *policy maker*. *Interest influencer* dapat melakukan beberapa teknik untuk mendapatkan dukungan *policy maker* atas kepentingan mereka. Pada beberapa kasus, mereka dapat melakukan sebuah kampanye untuk menyampaikan pesan, tidak hanya kepada *policy maker*, namun juga kepada *bureaucratic influencer* serta *partisan influencer*. Dalam beberapa kasus lain, mereka dapat menjanjikan dukungan finansial bagi *policy maker* untuk menunjang keputusannya, bahkan sebaliknya, mereka juga bisa memutus dukungan finansial untuk menghambat *policy maker* memutuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan *interest influencer* memiliki peran dalam proses perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara.

Terakhir, *Mass influencer*, adalah opini masyarakat yang menjadi pertimbangan *policy maker* untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Dalam analisisnya, Coplin mencoba untuk membandingkan situasi *mass influencer* dari negara penganut sistem politik tertutup dengan negara penganut sistem politik terbuka. Pada sistem politik tertutup, aktor *policy maker* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap masyarakat. Beberapa contohnya adalah kontrol atas media massa serta penerapan sensor terhadap sebuah pendapat, sehingga menyebabkan tingginya peluang praktik manipulasi oleh para aktor *policy maker*. Sedangkan pada sistem politik terbuka, peluang praktik manipulasi oleh *policy maker* terhitung rendah, dengan lebih luasnya iklim opini publik. Meskipun demikian, menurut Coplin, kebebasan opini publik pada negara penganut sistem politik terbuka tidak sebebaskan di negara-negara demokrasi. Coplin juga berpendapat bahwa *mass influencer* dalam bentuk opini publik biasanya digunakan *policy maker*

justro untuk menjustifikasi manuver-manuver politik luar negeri, bukannya untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri.

1.4.2 Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, bidang ekonomi dan militer adalah dua variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Coplin merumuskan beberapa indikator pertimbangan dalam dimensi kemampuan ekonomi seperti (1) Kapasitas Produksi Barang dan Jasa, (2) Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional; serta beberapa indikator dalam dimensi kemampuan militer seperti (1) Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer, (2) Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri, serta (3) Ketidakstabilan Internal dan Kemampuan Militer. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan kelemahan negaranya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Dalam analisisnya, Coplin berpendapat bahwa dengan meningkatnya kapabilitas militer, maka ekonomi sebuah negara juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika kapabilitas ekonomi sebuah negara meningkat, maka kapabilitas militer juga akan meningkat. Selain itu, Coplin juga berpendapat bahwa negara industri cenderung memiliki peralatan militer yang lebih mumpuni dibandingkan dengan negara agraris (Coplin, 1974).

Coplin mengemukakan tiga faktor utama yang memengaruhi kapabilitas militer sebuah negara, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan militer, serta perlengkapan militer. Meskipun setiap negara memiliki kapabilitas militer yang berbeda, tetapi dengan melihat tiga faktor tersebut sebagai pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, maka *policy maker* dapat menilai seberapa

efektif sebuah kebijakan yang dirumuskannya (Coplin, 1974). Pada akhirnya, kapabilitas militer dan kapabilitas ekonomi adalah dua unsur dominan yang dapat berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai pemberi tekanan bagi negara lain.

1.4.3 Konteks Internasional

Coplin berpendapat bahwa terdapat tiga faktor penting dalam diskursus konteks internasional, yaitu faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sehubungan dengan hal tersebut, Coplin mengemukakan bahwa lingkungan internasional sebuah negara terdiri dari lokasi geografis yang didudukinya, di mana terdapat hubungan dengan negara-negara lain yang berada di sekitarnya. Selain itu, lingkungan internasional sebuah negara juga dinilai dari hubungan-hubungan ekonomi dan politik negara tersebut dengan negara lain. Sehingga, geopolitik sebuah negara merupakan salah satu aspek penting dalam politik luar negerinya.

Selain geopolitik, Coplin juga menjelaskan pentingnya aspek hubungan ekonomi dan hubungan politik yang berkaitan satu sama lain. Hubungan ekonomi memungkinkan sebuah negara untuk menerima arus modal, sehingga negara cenderung akan bergantung kepada negara lain. Selanjutnya, hubungan politik sebuah negara dengan negara-negara lain dalam lingkungan internasionalnya berperan penting untuk proses perumusan kebijakan luar negerinya (Coplin, 1974).

1.4.4 Pengambil Keputusan (*Decision Maker*)

Coplin mendeskripsikan Pengambil Keputusan sebagai aktor politik yang terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri. Coplin berasumsi bahwa suatu kebijakan politik adalah hasil dari seorang aktor politik, terlepas dari peran politik

luar biasa yang mungkin diduduki oleh aktor politik tersebut. Seorang pengambil keputusan (*decision maker*) merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab resmi ataupun pengaruh signifikan untuk membuat sebuah kebijakan politik yang melibatkan negara mereka dalam urusan internasional dengan mempertimbangkan tiga indikator seperti politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional (Coplin, 1974).

1.4.5 Bantuan Militer

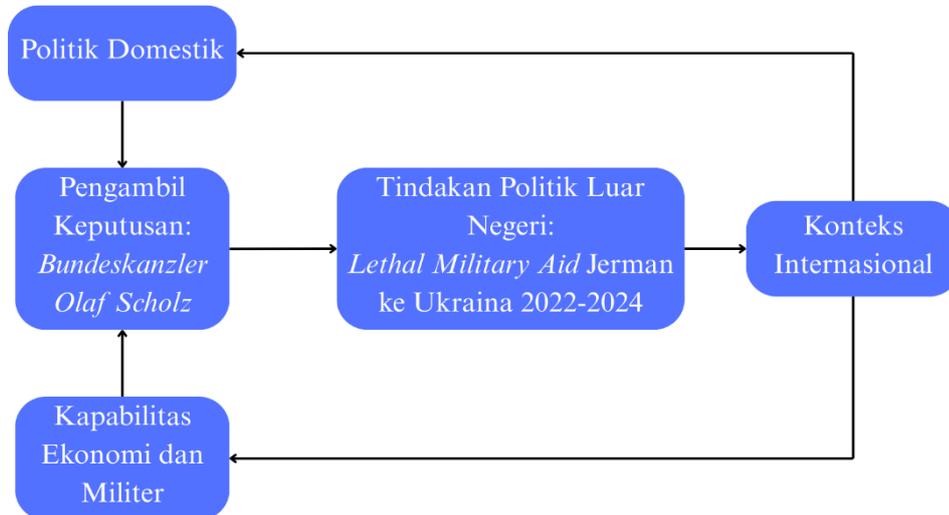
Hans Morgenthau dalam artikelnya yang berjudul "*A Political Theory of Foreign Aid*" menyebutkan bahwa bantuan militer luar negeri (*foreign military aid*) merupakan salah satu dari enam bentuk kebijakan bantuan luar negeri yang terdiri dari bantuan luar negeri humaniter, bantuan luar negeri subsisten, bantuan luar negeri prestise, suap serta bantuan luar negeri untuk pengembangan ekonomi. Menurut Morgenthau, bantuan militer secara tradisional merupakan salah satu instrumen politik luar negeri yang digunakan oleh suatu negara untuk memperkuat aliansi mereka dengan negara lain. Biasanya, bantuan militer tradisional dapat dideskripsikan sebagai pembagian kerja antara dua sekutu yang menggabungkan sumber daya militer mereka, dengan saling menyediakan sumber daya ekonomi, material, pelatihan pasukan, dan tenaga kerja (*manpower*). Di sisi lain, bantuan militer kontemporer tidak hanya diberikan kepada sekutu saja, tetapi juga kepada negara non-sekutu. Bantuan militer tersebut diberikan oleh negara pemberi untuk mencari keuntungan politik sebagai imbalan atas bantuan militernya. Dengan demikian, bantuan militer tersebut biasanya secara impisit mengikat negara penerima kepada negara pemberi (Morgenthau, 1962).

Selanjutnya, Sullivan, dkk dalam artikelnya yang berjudul “*US Military Aid and Recipient State Cooperation*” mendeskripsikan bantuan militer sebagai bantuan pinjaman dan hibah militer bilateral total, sebagaimana yang disebutkan dalam Greenbook USAID. Berdasarkan Greenbook USAID, bantuan militer terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional, Program Hibah Bantuan Militer, Pembiayaan Kredit Militer Asing, serta Transfer Kelebihan Artikel Pertahanan. Dalam artikelnya, Sullivan, dkk menganalisis bantuan militer sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang secara khusus digunakan untuk memengaruhi hasil politik atau keamanan di negara penerima bantuan, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami konflik dan transisi politik. Selain itu, Sullivan, dkk juga menyoroti bagaimana bantuan militer juga berdampak pada stabilitas politik domestik, tingkat demokratisasi, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu, bantuan militer dipandang sebagai instrumen yang bersifat ganda, yaitu untuk memperkuat mitra strategis yang berisiko memperburuk stabilitas politik domestik jika tidak diawasi dengan baik (Sullivan, Tessman, & Li, 2011).

Lanoszka & Becker juga menjelaskan bagaimana negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat dan Jerman) menggunakan istilah “*offense-defense*” dan “*lethality*” sebagai instrumen dalam strategi politik luar negeri mereka. Oleh karena itu, Lanoszka & Becker mendeskripsikan *Lethal aid* sebagai bantuan militer yang mencakup senjata dan peralatan perang yang dirancang untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan fisik secara langsung kepada musuh. *Lethal aid* dapat mencakup senapan mesin, persenjataan anti-tank, serta sistem artileri.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan pemaparan logika berpikir di atas, sintesa pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penjabaran terkait terciptanya sebuah kebijakan luar negeri yang didasari oleh adanya beberapa isu dalam konteks internasional. Sebelum kebijakan luar negeri tersebut diputuskan, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pengambil keputusan seperti aspek politik domestik serta kapabilitas ekonomi dan militer. Setelah mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, sebuah kebijakan luar negeri dapat diputuskan dan diresmikan oleh pengambil keputusan.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Foreign Policy Decision Making, maka penulis menyusun hipotesis untuk menjadi jawaban sementara atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Proses perumusan kebijakan *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, dalam konteks internasional, Jerman yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa didorong untuk melakukan kebijakan serupa, yaitu mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya korban sipil serta adanya isu ekspansionisme Rusia. Kedua, aktor politik domestik Jerman sebagai *policy influencer* memegang peranan penting sebagai pengambil kebijakan dalam proses perumusan kebijakan *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina. Ketiga, Jerman sebagai kekuatan besar dari segi ekonomi ataupun militer yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa memberikan bantuan militer secara bertahap dengan memperhatikan intensitas dan kebutuhan strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melalui hibah peralatan militer, pembiayaan kredit militer, dan pelatihan pasukan militer Ukraina. Pada akhirnya, semua pertimbangan tersebut menghasilkan suatu kebijakan final untuk mengirimkan bantuan militer berat (*lethal military aid*) ke Ukraina dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan Jerman dalam mempersenjatai dan memperkuat kapabilitas Angkatan Bersenjata Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina 2022-2024.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah

penelitian yang harus mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer, atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui sejumlah pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk (buku, artikel, dokumen resmi, dan laporan) yang diangkat sesuai dengan topik penelitian (Creswell, 2014). Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksplanatif yang menjelaskan dan menganalisa sebab suatu isu menggunakan konsep yang relevan. Penelitian eksplanatif berarah kepada studi kasus yang dianalisis hubungan kausalnya (sebab akibat), sebagai asumsi untuk prediksi selanjutnya dari korelasi yang terbukti antar variabel dependen dan variabel independen yang terlibat (Nugrahani & Hum, 2014).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk memahami dinamika posisi Jerman dalam konflik Rusia-Ukraina secara utuh, maka perlu ditetapkan adanya suatu batasan penelitian. Penelitian ini dibatasi untuk meneliti bagaimana manuver politik luar negeri Jerman dalam diskursus konflik Rusia-Ukraina terhitung sejak masa pra-invasi, yakni Januari 2022, awal invasi Februari 2022, hingga penelitian ini dibuat yakni Desember 2024. Penulis memilih batasan awal Januari 2022 karena menurut Claire Mills, sejak konflik Rusia-Ukraina 2014, Pemerintah Federal Jerman menyatakan tidak berkenan untuk mengirimkan bantuan militer berat (*lethal military aid*) ke Ukraina, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan tensi politik dengan Rusia. Tetapi setelah invasi Rusia, tepatnya pada 26 Februari 2022, Jerman bersedia untuk mengirimkan *lethal military aid* ke Ukraina (Mills, 2023). Selanjutnya,

penulis menetapkan Desember 2024 sebagai batasan akhir karena pada akhir tahun 2024 terjadi dinamika politik domestik Jerman –perpecahan koalisi politik, yang memengaruhi keberlangsungan pengiriman *lethal military aid* ke Ukraina sebelum diselenggarakannya pemilihan umum di tahun 2025 (Werkhäuser, 2025). Batasan tersebut dibuat sesuai dengan indikator tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi proses perumusan kebijakan pengiriman bantuan militer Jerman ke Ukraina yang menyebabkan adanya pergeseran posisi Jerman dalam konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data kepustakaan, yang nantinya data tersebut diolah sebagai bahan penelitian terhadap topik penelitian (Zed, 2008). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, laman resmi Pemerintah Federal Jerman, serta data sekunder resmi dari pihak kedua yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang disusun oleh Siyoto dan Sodik. Siyoto dan Sodik berpendapat bahwa analisis data merupakan rangkaian penyusunan data hingga membentuk suatu pola, kategori, ataupun satuan uraian dasar untuk menemukan sebuah tema tertentu dan merumuskan hipotesis penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Dengan kata lain, analisis

data adalah proses eliminasi data yang disesuaikan dengan elemen tertentu atau tema penelitian. Siyoto dan Sodik menambahkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yang bermakna penelitian kualitatif dimulai dari pengumpulan fakta empiris. Dengan demikian, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah serangkaian usaha untuk mencari sebuah makna dari berbagai data penelitian yang dikumpulkan sesuai dengan klasifikasi tertentu.

Adapun proses analisis data kualitatif menurut Siyoto dan Sodik adalah sebagai berikut:

Reduksi Data. Reduksi data dapat diartikan sebagai eliminasi data, sehingga data yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah data yang sesuai dengan pola dan fokus penelitian. Reduksi data dapat dilakukan dengan menyusun sebuah abstraksi, yang merupakan rangkuman inti penelitian, proses penelitian, hingga hipotesis penelitian agar sesuai dengan klasifikasi data pada penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Penyederhanaan data penelitian dilakukan hanya dengan menggunakan data yang sesuai dengan batasan dan cakupan penelitian, oleh karena itu peneliti tidak perlu menggunakan data yang tidak sesuai dengan batasan dan cakupan penelitian.

Penyajian Data. Penyajian data adalah pemaparan berbagai informasi tersusun yang dapat menciptakan satu kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat sebuah pola, ataupun sebuah bagian dalam

sebuah pola, dengan melakukan klasifikasi dan penyajian data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Kesimpulan atau Verifikasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menarik sebuah kesimpulan dari proses penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Menyusun kesimpulan bertujuan untuk mengungkap suatu makna dari sajian data yang telah melalui proses pencarian hubungan, persamaan, atau perbedaan dari data-data yang ditemukan dalam penelitian.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian ini dengan jelas, maka diperlukan adanya sistematika penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini terdiri dari sub-bab latar belakang masalah; tinjauan pustaka, berisikan landasan penelitian dengan menggunakan penelitian terdahulu; rumusan masalah penelitian, berisikan pertanyaan penelitian; tujuan penelitian, berisikan indikator capaian penelitian; kerangka teori, berisikan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian; sintesa pemikiran, berisikan alur konsep yang digunakan dalam penelitian; argumen utama; serta metode penelitian, yang berisikan: tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II merupakan pemaparan proses perumusan kebijakan *Lethal Military Aid* ke Ukraina dari kebijakan Jerman untuk tidak mengirimkan bantuan

militer pada Januari 2022 sebelum invasi, hingga perubahan kebijakan Jerman untuk mengirimkan bantuan militer ke Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 hingga Desember 2024. Penulis berusaha memetakan alasan perubahan kebijakan Jerman dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan luar negeri dengan menggunakan konsep Foreign Policy Decision Making. Sehingga pada bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab yang terdiri dari: (1) Konteks Internasional Jerman dalam Pengiriman Bantuan Militer ke Ukraina, (2) Politik Domestik Jerman, (3) Kapabilitas Ekonomi dan Militer Jerman.

BAB III merupakan pemaparan keterlibatan aktor politik sebagai pengambil kebijakan *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina sejak Februari 2022 hingga batasan penelitian ini dibuat, Desember 2024. Penulis berusaha untuk menyusun informasi mengenai keterlibatan beberapa aktor politik serta implementasi kebijakan bantuan militer Jerman berdasarkan gelombang pengiriman dan intensitas bantuan militer yang dikirim oleh Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Pertahanan Federal maupun dari Pemerintah Negara sekutu Jerman yang menggunakan teknologi militer buatan Jerman. Sehingga pada bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab yang terdiri dari: (1) Pengambil Kebijakan (*Decision Maker*) dan (2) Implementasi Kebijakan *Lethal Military Aid* Jerman ke Ukraina 2022-2024.

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan, yang terdiri dari keseluruhan inti pembahasan pada setiap bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat bagian saran, yang berisikan *research gap* dan rekomendasi potensi

pembahasan lanjutan terkait topik perumusan kebijakan luar negeri Jerman ataupun topik lain yang relevan lainnya.